



Politik Elektoral Jakarta: Koalisi Buruh Jakarta dan Realisasi Politik Programatik

Barik Ali Amiruddin¹
Nur Iman Subono²
Muhammad Hasan Syamsudin³

^{1,2,3}Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: aliamiruddin.baa@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;

Labour

Keyword 2;

Programmatic Politics

Keyword 3;

Electoral Politics

Keyword 4;

Political Contract

Keyword 5;

Local Politics

Abstract: The purpose of this paper is to analyse how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) during and after the Jakarta gubernatorial election in 2017. Our analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labour-candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federation/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;

Buruh

Kata Kunci 2;

Politik Programatik

Kata Kunci 3;

Politik Elektoral

Kata Kunci 4;

Kontrak Politik

Kata Kunci 5;

Politik Lokal

Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

Article History: Received 11-Agustus-2020, Revised 14-September-2020, Accepted: 22-Oktober-2020

PENDAHULUAN

Penelitian buruh dan politik di Indonesia telah banyak dikaji dalam berbagai sudut pandang. Diantaranya fokus pada perjuangan gerakan buruh dalam tuntutan melalui mekanisme gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan aksi masa (Algifari, 2014; Juliawan, 2014; Setiawan, 2016; Caraway & Ford, 2017; Yusnil, 2017, Djani & Tornquist, 2017), faktor fregmentasi antar serikat buruh terhadap politik (Amin, 2011), peran minimal gerakan buruh berpolitik dalam sistem demokrasi akibat arus pembangunan ekonomi kapitalis, produksi dan pasar kerja fleksibel (Tornquist, 2007; Beeson & Hadiz, 2007; Habibi, 2013), prospek dan peran gerakan buruh dalam politik pasca reformasi (Jurnal Sosdem, 2011; Zuhdan, 2014; Triyono, 2016), dan dinamika buruh di politik elektoral lokal (Ford et al., 2014; Ford, 2014; Savirani, 2014; Setiawan, 2016; Saleh, 2017). Penelitian ini fokus pada tema terakhir yaitu terkait dengan dinamika buruh dalam politik elektoral lokal di Indonesia dengan studi kasus kontrak politik antara Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Pada masa Orde Lama, terdapat beberapa Partai Politik (Parpol) yang memiliki platform perjuangan kaum buruh yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Murba, Partai Buruh, Partai Buruh Indonesia, Partai Buruh Merdeka, dan Partai Rakyat Djelata. Namun, hingga saat pemilu 1955 diselenggarakan hanya PKI, Partai Murba dan Partai Buruh yang ikut dalam kontestasi politik elektoral (Wijaya, 2016:314). Pada masa ini, kelompok-kelompok buruh berperan dalam dua hal yaitu sebagai underbow Parpol maupun memiliki Parpol. Dari ketiga partai yang ikut dalam kontestasi Pemilu 1995 tersebut hanya PKI yang memiliki presentase suara tinggi yaitu 16,47% suara dari 37.837.105 suara sah dalam pemilihan Anggota Konstituante serta 16,4% suara dari 37.785.299 suara sah untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan partai lain seperti Murba sebagai contoh hanya mendapatkan 0,47% di pemilihan Anggota Konstituante dan 0,5% untuk pemilihan Anggota DPR (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019).

Setelah peristiwa 30 September 1965, terjadi pemberantasan para serikat buruh yang memiliki hubungan dengan komunisme serta pemutusan hubungan antara serikat dan Parpol (Caraway et al., 2015). Dalam kurun waktu lima tahun Soeharto berkuasa, kelompok buruh mulai termarjinalkan dengan adanya dua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru (Orba), yaitu; kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 sebagai dasar yuridis fusi partai politik serta kebijakan politik hukum perburuhan yang secara umum memiliki aturan terkait pembatasan aktivitas politik kelompok buruh, sebagai contoh kebijakan pembentukan serikat buruh tunggal (single union) (Wijaya, 2016:315-316). Dari kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung mengeliminasi peran kelompok buruh baik dalam hal kebebasan berserikat, pembentukan partai politik dan ikut serta secara langsung dalam pemilihan umum.

Selanjutnya pada era reformasi hingga proses konsolidasi demokrasi, dimana aturan politik hukum kepartaian, kebebasan berserikat dan reformasi elektoral mulai dibuka seluas-luasnya, keterlibatan politik kelompok buruh dilakukan dengan dua cara; pertama keterlibatan buruh dalam kontestasi politik nasional dan lokal. Pada tingkat pemilu nasional tahun 1999, 2004 hingga 2009 beberapa kelompok buruh mendirikan partai politik, sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 baik di tingkat lokal dan nasional kelompok buruh mulai mendorong kadernya maju sebagai calon legislatif namun melalui kendaraan partai politik yang mapan. Terkait hal ini terdapat penelitian dari Caraway et al., (2015) mengenai kegagalan beberapa federasi yang mengusung kadernya maju sebagai calon legislatif di Bekasi dan Tangerang akibat kurangnya koordinasi dengan pengurus federasi pusat serta kurangnya sosialisasi calon kepada anggota-anggota buruh, lalu penelitian Savirani (2015) dan Saleh (2017) yang meneliti keberhasilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam menjadikan beberapa kadernya menduduki kursi legislatif tingkat daerah.

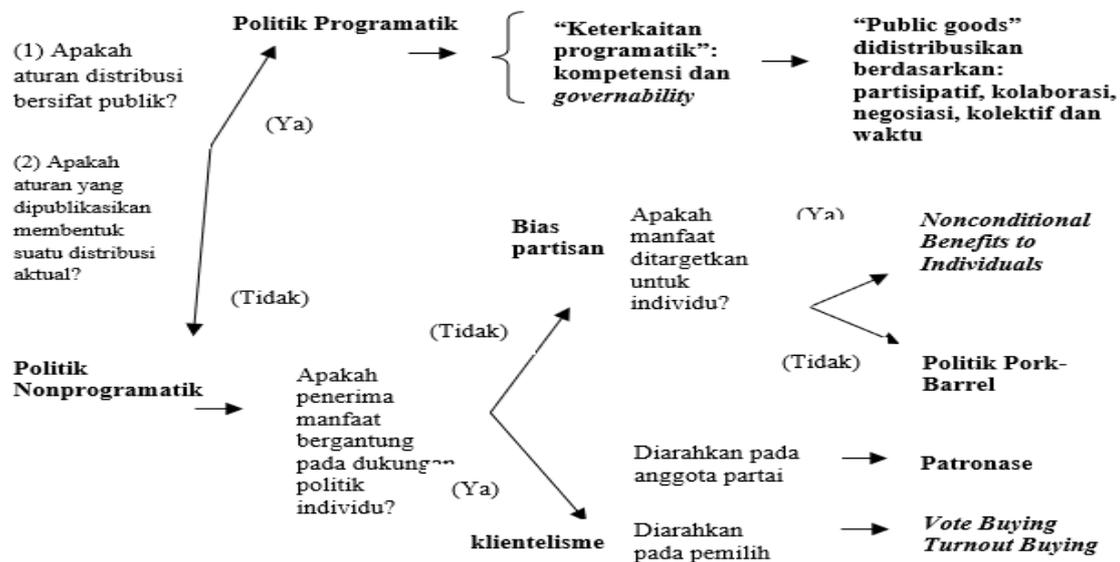
Kedua, melakukan kontrak politik dengan pasangan calon yang bukan merupakan kader kelompok buruh namun pro terhadap aspirasi buruh. Sejauh ini strategi kontrak politik dilakukan pada calon eksekutif di tingkat nasional dan daerah yaitu pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Hal

ini dilakukan karena pemimpin eksekutif memiliki wewenang langsung terkait kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada pilar-pilar perjuangan buruh seperti isu upah, jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Penelitian terkait kontrak politik antara kelompok buruh dan kandidat belum banyak dikaji, namun penelitian ini terinspirasi dari Savirani dan Aspinall (2017) yang meneliti kontrak politik antara masyarakat miskin kota di Jakarta dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Maka dari itu, secara tidak langsung penelitian ini akan membandingkan persamaan dan perbedaan variabel di dalamnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga tidak akan hanya membahas proses politik distributif pada saat Pilgub namun juga melihat bagaimana dan sejauh mana distribusi programatik dilakukan paska pemilu. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya yang tidak banyak menggali proses realisasi program dalam kontrak politik paska Pilkada. Maka dari itu artikel ini pada dasarnya memiliki dua topik pembahasan utama yaitu pola hubungan antara KBJ dan Anies Baswedan-Sandi Uno saat Pilgub dan proses realisasi kontrak politik paska Pilgub.

Dalam membedah studi kasus ini peneliti akan menggunakan teori distribusi politik dari Stokes et al., (2013) (lihat gambar 1).

Gambar 1. Skema Konsep Politik Distributif



Karena kompleksitas studi kasus yang diteliti, penulis memodifikasi teori tersebut dengan sedikit menambahkan teori dari Kitschelt et al., (2011) dan lima indikator politik programatik dari Savirani (2018). Pilihan teori yang digunakan karena melihat dari pola kontrak politik antara KBJ dan Anies-Baswedan yang dilakukan pada saat Pilgub dengan pertukaran suara dari buruh dan realisasi kontrak politik paska pemilu. Pada masa pemilu, proses kontrak politik dilakukan secara kompleks dengan melibatkan policy broker sebagai penghubung antara kandidat dan kelompok buruh dan di sisi lain kelompok buruh di Jakarta melakukan konsolidasi baik internal maupun lintas federasi untuk membentuk koalisi sebagai mesin politik kandidat. Paska terpilihnya kandidat kelompok buruh dan gubernur terpilih berkolaborasi untuk merealisasikan poin-poin yang ada dalam kontrak politik. Secara teknis distribusi politik dilakukan oleh birokrat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Federasi Pekerja yang ditunjuk untuk mendistribusikan keseluruhan pekerja yang ada di Jakarta. Selain itu kelompok buruh juga membentuk Tim 7 yang berkomposisi perwakilan buruh Jakarta, pengusaha dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memiliki akses negosiasi secara langsung dalam penentuan isu-isu salah satunya terkait Upah Minimum Provinsi dan Sektoral.

Jika melihat kasus di atas, penulis akan menggunakan model pertukaran keuntungan secara kolektif yaitu programatik dimana menurut Stokes et al., (2013) dilakukan dengan target jangka panjang dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Berbeda halnya dengan kajian

patron-klien di Indonesia saat ini yang didominasi temuan terkait pembelian suara (vote buying) dimana pertukaran ini dikategorikan sebagai pertukaran non-programatik (klientelistik) (Ardiansa, et al.,2018), penelitian ini akan juga berkontribusi pada temuan melemahnya politik patronase di Indonesia. Melihat dari teori yang peneliti gunakan memang masuk dalam kluster aliran marketis yang langsung spesifik membahas dalam domain pemilu dimana pertukarannya dilihat dari pertukaran material dan suara (Sokes et al, 2013; Kitschelt, 2000; Aspinall dan Berenschot, 2019). Dari kluster marketis di atas mayoritas melihat titik pijak subjek penelitiannya lebih kepada kandidat atau politisi, namun dalam penelitian ini titik pijaknya dimulai dari pemilih (voters) yaitu kelompok buruh.

METODE

Sebagaimana studi kasus yang dijelaskan di atas, metode kualitatif penulis gunakan dalam menganalisis kasus kontrak politik KBJ dan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, teknik pengumpulan data primer melalui metode wawancara mendalam (indepth-interview). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling di mana informan dipilih berdasarkan sifat, tujuan penelitian serta didasarkan preferensi kapasitas pengetahuan dan pengalaman ataupun representasi mereka atas topik yang diteliti (Cairney dan Denny 2015, 117-125). Teknik ini diaplikasikan kepada lima kategori narasumber, yaitu: Mardani Ali Sera selaku Tim Pemenangan Anies-Sandi, Kahar S. Cahyono selaku Vice President DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia merangkap Kepala Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Winarso yang merupakan Ketua DPW FSPMI sekaligus Koordinator Koalisi Buruh Jakarta dan dari pihak akademisi yang ahli terkait buruh go politic yaitu Amalinda Savirani selaku dosen di departemen politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka, focus group discussion, observasi dan wawancara semi terstruktur. Kedua, teknis mengumpulkan data sekunder melalui telaah studi literatur dan dokumentasi seperti laporan instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan, jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah dan surat kabar online. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan argumen yang dibangun dalam tulisan ini. Secara teknis, analisis data dilakukan melalui tahap: koleksi, klasifikasi, kategorisasi, kodifikasi dan interpretasi.

TEMUAN DAN HASIL

STRATEGI POLITICAL ENGAGEMENT KBJ: KONSOLIDASI DAN PERAN POLICY BROKER

Isu SARA sangat dominan di Pilgub DKI Jakarta 2017 sehingga mempengaruhi perilaku politik pemilih (Perludem, 2017). Implikasi dari dominannya isu ini hingga menutup berbagai dinamika lain yang terjadi salah satunya adalah adanya fenomena kontrak politik antara KBJ dan Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno. Isu SARA ini pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan pemilih untuk tidak memilih salah satu pasangan calon. Berbeda halnya dengan kelompok buruh, pada saat pilgub berlangsung kelompok buruh memiliki kesepakatan "asal tidak Ahok" namun bukan karena kasus penistaan agama melainkan hal-hal sebagai berikut yang didasarkan pada wawancara dengan Kahar S Cahyono selaku vice president DPP FSPMI :

"Terdapat tiga hal yang menjadikan kami memutuskan tidak memilih Ahok; pertama, isu pengupahan dimana saat itu terbit PP 78 tahun 2015 dimana mengatur bahwa upah minimum dilihat hanya dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, saat itu kami meminta kepada Ahok untuk menentukan upah tidak mengacu pada aturan baru tersebut namun mengacu pada survei Kebutuhan Hidup layak (KHL) dan saat itu Ahok tidak mau. Kedua adalah isu reklamasi. saat itu kami memiliki jaringan dengan kawan-kawan di nelayan yang terdampak reklamasi dan lagi-lagi Ahok tetap pro reklamasi. Ketiga, soal isu korupsi yang merupakan konsentrasi dalam ranah gerakan sosial buruh, kita melihat ada kasus korupsi Sumber Waras. Maka dari tiga hal tersebut kami memutuskan untuk tidak memilih ahok "Asal Tidak Ahok".

Pernyataan tersebut juga mengarahkan pada pembahasan terkait kemungkinan kelompok buruh merapat kepada Agus Yudhoyono-Sylviana Murni atau Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno. Namun hingga putaran pertama Pilgub berlangsung dimana pasangan Anies-Sandi dan pasangan Ahok-Djarot melaju ke putaran kedua (lihat table 1) keputusan mulai mengerucut kepada satu pasangan calon yaitu Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam hal ini kelompok buruh yang dimaksud adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dimana didalamnya terafiliasi Sembilan (9) federasi yaitu FSPMI, FSP FARKES Reformasi, Serikat Pekerja Nasional, FSP Pariwisata Reformasi, ASPEK Indonesia, FSP KEP KSPI, FSP PPMI, FSP ISI, dan PB PGRI (Caraway dan Ford, 2019). Guna mempersiapkan strategi sebelum melakukan negosiasi dengan Anies R Baswedan dan Sandiaga Uno KSPI lewat ketua DPW FSPMI yaitu Winarso, melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepada seluruh federasi/serikat yang terafiliasi dengan KSPI dari tingkat PUK (Pimpinan Unit Kerja) di pabrik-pabrik hingga Federasi serta federasi/serikat di luar afiliasi KSPI. Konsolidasi dilakukan guna mendiskusikan dan mengakomodir usulan dari federasi-federasi sehingga diputuskan untuk mencontoh format Kontrak Politik yang digunakan KSPI saat melakukan kontrak politik dengan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 namun poin-poin tuntutan disesuaikan dengan tuntutan spesifik permasalahan buruh di DKI Jakarta. Selanjutnya, sebagai suatu usaha untuk menjadi mesin politik Anies-Sandi apabila kontrak politik disetujui, maka kelompok buruh ini membentuk koalisi informal bernama Koalisi Buruh Jakarta.

Strategi selanjutnya adalah proses negosiasi dan tawar menawar keuntungan dengan Anies-Sandi. Sebelum dilakukan negosiasi, KBJ melalui koordinatornya melakukan pengkajian dengan Presiden KSPI yaitu Said Iqbal. Hal ini dilakukan karena selain untuk mendapatkan persetujuan juga nantinya Said Iqbal yang akan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak partai pengusung. Dalam temuan dari hasil wawancara kepada narasumber utama didapatkan bahwa Said Iqbal melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo terkait dengan negosiasi kontrak politik yang telah dikonsolidasikan oleh KBJ. Saat dikonfirmasi terkait hal ini kepada Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi yaitu Mardani Ali Sera, bahwa memang komunikasi KBJ melalui Said Iqbal banyak dilakukan dengan Partai Gerindra lewat Prabowo Subianto dan baru disampaikan langsung kepada Anies-Sandi. Berdasarkan hal ini jika dilihat dari peran Said Iqbal sebagai penghubung antara KBJ dan Anies-Sandi sangat penting selain karena kedudukannya secara organisatoris di Konfederasi, Iqbal dalam pengalamannya memiliki track record bersentuhan dengan partai pengusung Anies-Sandi baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif (Lane, 2018).

Setelah terjalannya komunikasi tersebut Said Iqbal dan KBJ menemui Anies-Sandi beserta tim hukumnya dan KBJ beserta tim advokasinya untuk bernegosiasi terkait dengan Kontrak Politik tersebut. Said Iqbal dalam pernyataannya jika Anies-Sandi bersedia untuk menandatangani kontrak politik tersebut sekaligus merealisasikannya jika terpilih, maka KBJ siap akan memobilisasi dan menyumbang setidaknya 500.000 suara berdasarkan hitungan 300.000 anggota KBJ ditambah keluarganya. Menurut Mardani Ali Sera suara buruh tersebut sangat signifikan, maka jika melihat

Tabel 1. Jumlah Perolahan Suara Putaran Pertama Pilgub DKI Jakarta 2017

NO	Paslon	Kep. Seribu		Jaksel		Jaktim		Jakpus		Jak Bar		Jakut		Jumlah	
		Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%
{1}	{2}	{3}		{4}		{5}		{6}		{7}		{8}		{9}	
1	Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni	3,891	27,26	177,363	14,77	309,708	19,42	101,744	17,87	203,107	16,11	142,142	16,53	937,955	17,05
2	Basuki Purnama dan Djarot	5,532	38,76	465,524	38,77	618,88	38,81	244,727	42,99	613,194	48,63	416,720	48,45	2,364,577	42,99
3	Anies R Baswedan dan Sandiag a Uno	4,851	33,98	557,767	46,46	665,902	41,76	222,814	39,14	444,743	35,27	301,256	35,02	2,197,333	39,95
Jumlah suara sah seluruh pasangan calon		14,274		1.200,654		1.594,490		569,285		1261,044		860,118		5,499,865	

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

secara menyeluruh status pekerjaan utama tahun 2017, 68% merupakan buruh dan karyawan (lihat diagram 1) maka secara modal, buruh memiliki suara yang cukup signifikan jika dilihat dari domain sektor pekerja. Namun bagi KBJ saat dikonfirmasi kepada Winarso selaku koordinator KBJ, angka 500.000 suara itu dimaksudkan utamanya kepada seluruh anggota KBJ karena tidak semua pekerja/buruh bergabung dalam keanggotaan federasi, selain itu KBJ lebih akan fokus pada mobilisasi suara buruh di daerah kawasan industri di Jakarta Timur.

Diagram 1: Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di DKI Jakarta, Agustus 2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Jika melihat pernyataan Winarso di atas apabila KBJ mampu menyumbang 500.000 suara untuk Anies-Sandi maka akan berdampak signifikan, pasalnya berdasarkan BPS Pemprov DKI Jakarta jumlah penduduk tahun 2017 saat itu mencapai 2,892,783 penduduk, tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah lain seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Hal ini yang merupakan salah satu faktor daya tawar KBJ dengan pihak Anies-Sandi, dimana selanjutnya Sandiaga Uno yang banyak berinteraksi dengan KBJ terkait realistiknya realisasi poin-poin dalam kontrak politik. Pada tanggal 4 April 2017 diadakan deklarasi dukungan KBJ di DPP Partai Gerindra yang dihadiri ribuan buruh serta penandatanganan kontrak politik oleh 13 perwakilan federasi/serikat pekerja yang tergabung dalam KBJ serta Anies-Sandi selaku pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. deklarasi dan penandatanganan kontrak politik tersebut didampingi Said Iqbal dan Prabowo Subianto. Maka jika melihat peran Said Iqbal sangatlah sentral khususnya dalam menghubungkan KBJ dengan pihak partai politik dan kandidat. Hal ini senada dengan proses terjadinya tawar menawar keuntungan dalam skema klientelistik dimana selain partai politik dan kandidat, broker juga memiliki potensi untuk mengawali terjadinya hubungan klientelistik (Tomsa, et al., 2013).

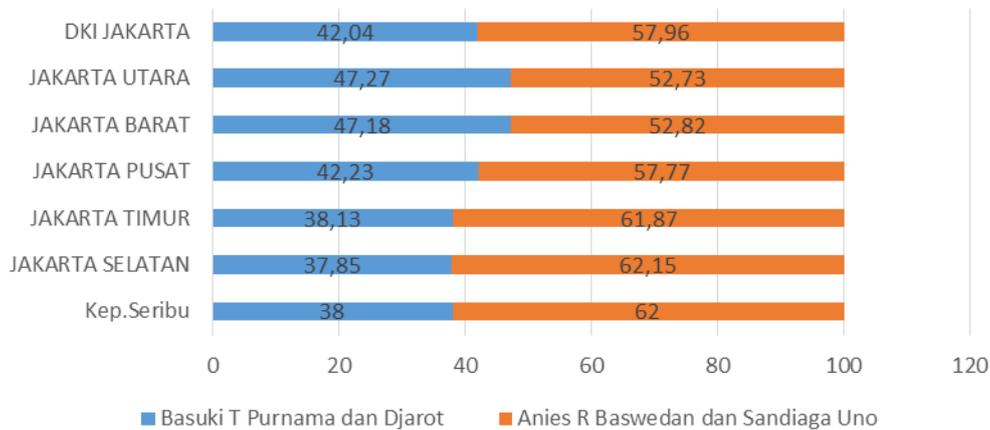
Peran Said Iqbal syarat sebagai broker namun memiliki posisi yang independen dan tidak serta dapat dimonitor oleh politisi atau pihak partai secara menyeluruh (Stokes, et al., 2013). Maka dalam penjelasannya Stokes, et al (2013) menyatakan bahwa broker memiliki potensi membelot atau mendukung secara penuh kandidat selama kepentingannya terpenuhi. Namun, peneliti lebih cenderung melihat bahwa Said Iqbal dikategorikan sebagai "policy broker" karena menurut Savirani dan Aspinall (2017) policy broker adalah seseorang yang memiliki dua kaki di kubu calon pemilih yaitu KBJ dan Partai politik. Walaupun istilah broker adalah identik dengan hubungan yang klientelistik namun pada kenyataannya pertukaran yang terjadi tidak merupakan pertukaran individualistik namun lebih pada pertukaran suara dan pelaksanaan program setelah Pilgub (beyond election) apabila kandidat terpilih (lihat kembali gambar 1 konsep distribusi politik). Oleh karenanya, semenjak disetujuinya kontrak politik ini KBJ memiliki peran sebagai mesin politik dalam memobilisasi suara buruh dan warga DKI Jakarta; strategi KBJ pada saat memobilisasi masa dijelaskan oleh Winarso selaku koordinator KBJ sebagai berikut:

"Selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, KBJ melakukan kampanye jalanan secara mandiri dan secara formal tidak bergabung dengan tim pemenang dari Anies-Sandi, walaupun ada anggota federasi yang bergabung itu sifatnya personal sebagai relawan. Maka dari itu, kebutuhan logistik kami sendiri yang membiayai lewat iuran langsung di lapangan maupun lewat dana operasional dari federasi. Bahkan untuk mengerahkan masa buruh kami menyewa mobil pickup dan bus sendiri, kebanyakan masa kami kerahkan dari para pekerja di kawasan Jakarta Timur lalu berkoordinasi dengan pengurus DPP FSPMI dan KSPI. Dalam kampanyenya kita mengangkat isu yang memang menjadi konsen kelompok buruh di Jakarta seperti isu upah minimum, reklamasi teluk Jakarta dan Korupsi Sumber Waras. Strategi kedua adalah dengan cara kampanye door-to-door baik ke perumahan kawasan tempat tinggal pekerja maupun masyarakat luas. Sasaran utama kita daerah Cakung karena banyak perkampungan dan kontrakan-kontrakan buruh. Pada saat pemungutan suara hingga penghitungan suara KBJ juga menyebarkan saksi-saksi di tiap-tiap TPS".

Pernyataan Winarso di atas senada dengan yang dikatakan oleh Mardani Ali Sera bahwasannya semenjak KBJ mendeklarasikan dukungannya kepada Anies-Sandi segala hal yang berhubungan dengan kegiatan KBJ dalam kampanye Anies-Sandi sangat otonom bahkan tidak ada sama sekali permintaan logistik baik ke kandidat maupun Partai pengusung. Menurut Winarso KBJ dikategorikan sebagai Tim Sukses (timses) lapangan sehingga berbeda dengan Timses utama dari Anies-Sandi. Dalam rapat koordinasi KBJ tidak mengetahui konsep-konsep dari Timses utama, KBJ lebih banyak berdiskusi untuk pemenangan Anies-Sandi di Rumah Djoeng FSPMI DKI dengan Garda Metal DKI Jakarta. Maka dari hal tersebut jika dilihat pada

diagram 2 di bawah ini Jakarta Timur memiliki presentase tertinggi kedua untuk Anies-Sandi sebesar 61,87% walaupun peneliti tidak mengetahui apakah suara tersebut disebabkan oleh kampanye buruh. Namun, setidaknya memang jika dilihat dari segi wilayah, Jakarta Timur merupakan kawasan industri dimana banyak buruh di wilayah tersebut.

Diagram 2: Presentase Perolehan Suara Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua Menurut Kab/Kota, 2017



Sumber: BPS Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan, pertama, pola hubungan pertukaran keuntungan yang terjalin antara kelompok buruh yaitu KBJ dengan Anies-Sandi merupakan pertukaran programatik karena dilakukan paska-pilgub. Namun, terdapat peran policy broker yaitu Said Iqbal yang sangat sentral sebagai penghubung adanya proses tawar menawar keuntungan. Secara teoritis hal ini masuk ranah klientelistik namun karena berbentuk program yang akan dilakukan setelah Pilgub maka bergeser pada ranah programatik. Kedua, kesamaan visi dan misi antara KBJ dan Anies-Sandi merupakan titik temu (entry point) sehingga terjadinya perjanjian kontrak politik. Ketiga, KBJ menjadi timses atau mesin politik lapangan yang otonom karena kuat secara finansial untuk keperluan logistik dan memiliki koordinasi yang sistemik secara internal. Maka dari tiga poin di atas menegaskan bahwa dalam tawar menawa keuntungan di masa Pilgub DKI Jakarta didasarkan atas pertukaran program bukan material yang bersifat partikularistik pada saat Pilgub saja, namun akan dilakukan untuk jangka panjang pasca-pilgub.

REALISASI KONTRAK POLITIK PASKA-PILGUB: KOLABORASI DISTRIBUSI ANTARA FEDERASI DAN BIROKRAT

Awal realisasi kontrak politik paska pilgub sempat mengalami hambatan. Hal itu terjadi pada saat Anies-Sandi tidak mampu memenuhi tuntutan buruh soal besaran UMP yang didasarkan pada KHL. Hal ini mengakibatkan KBJ melakukan reaksi keras dengan melakukan aksi besar-besaran di Balaikota DKI Jakarta. Pada pembahasan sebelumnya, peneliti akan sedikit membandingkan dengan penelitian Aspinall dan Savirani (2017) dimana dalam temuannya Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) memiliki policy brokers yang terlibat secara formal dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Maka selama proses teknokrasi kebijakan yang nantinya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, poin-poin kontrak politik JRMK sangat terakomodir. Maka dalam realisasi kontrak politiknya sama sekali tidak memiliki masalah. Hal ini berbeda dengan KBJ dimana Said Iqbal sebagai Policy broker sama sekali tidak dilibatkan dalam Tim Sinkronisasi ini. Hal ini disesalkan oleh Koordinator KBJ yang menyatakan:

"Tadinya kami berharap KBJ atau perwakilan KBJ selalu dilibatkan di Tim Sinkronisasi hingga tahap implementasi. Saat itu kami berfikir bahwa KBJ hanya akan menunggu jadinya saja namun setelah diteliti kontrak politik tidak dibahas dalam tim sinkronisasi

akhirnya kita tagih berulang-ulang kepada Anies-Sandi pada saat awal menjabat hingga puncaknya pada saat UMP 2018 tidak sesuai dengan tuntutan kita. Namun setelah aksi kami duduk bareng dan bertemu pak Prabowo dan beliau mengingatkan Anies-Sandi untuk merealisasikan kontrak politik"

Maka dari pernyataan ini Said Iqbal sempat berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan menyatakan Anies-Sandi "pembongkar". Dari hal ini bisa terlihat bahwa di sisi lain sebagaimana dalam pengertian Stokes et al (2013:97) bahwa broker menginginkan kemenangan partai atau kandidat namun di sisi lain mampu mengancam politisi atau kandidat. Hal ini terjadi dalam kasus kontrak politik KBJ dan Anies-Sandi sehingga memang dalam hubungan klientelistik belum banyak dibahas suatu fenomena politik di Indonesia dimana broker mengancam kandidat dengan mengerahkan pemilih (voters) untuk memprotes kandidat.

Isu UMP di atas memang menjadi salah satu pilar utama perjuangan buruh. Namun, pihak Anies-Sandi memang tidak bisa melanggar aturan yang ada di atasnya sehingga Anies-Sandi memberikan alternatif lain berupa subsidi-subsidi dalam hal transportasi gratis, pendidikan untuk anak-anak pekerja, dan potongan harga pangan (lihat table 2). Subsidi-subsidi tersebut dimasukkan dalam satu Kartu yaitu Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan bagi penerima KPJ dapat mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus. Dari hal ini, realisasi subsidi tersebut dikoordinatori oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta (Disnakertrans) DKI Jakarta dimana Andri Yansyah selaku kepala dinasnyanya. Sedangkan soal UMP, KBJ dan Anies-Sandi memaksimalkan solusi lewat UMSP

Karena secara teknis kebutuhan fasilitas subsidi tersebut melibatkan instansi lain, maka Disnakertrans DKI Jakarta berkolaborasi dengan dinas lain seperti dinas pendidikan untuk Kartu Jakarta Pintar Plus, PT Transjakarta untuk transportasi gratis, PD Pasar Jaya untuk potongan harga pangan, dan Bank DKI untuk pengadaan KPJ. Namun dalam temuan peneliti, proses pendataan pekerja/buruh yang berhak mendapatkan KPJ melibatkan federasi/serikat buruh di DKI Jakarta untuk nantinya diproses untuk verifikasi. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa distribusi ini tidak hanya diarahkan kepada kelompok buruh yang mendukung Anies-Sandi pada saat Pilgub, namun kepada seluruh pekerja/buruh DKI Jakarta.

Maka jika melihat pada rumusan Stokes et al (2013) terkait kriteria programatik, fenomena di atas dapat dikategorikan sebagai realisasi politik programatik atau dalam istilah Stokes et al (2017) masuk dalam skema distribusi politik programatik seperti; program dieksekusi setelah masa pemilu, mengacu pada peran dalam jabatan, penerima manfaat dan keuntungan adalah seluruh buruh dan tanpa ada diskriminasi, pelaksana program adalah birokrat yaitu Disnakertrans DKI Jakarta, dan yang terakhir semua program yang ditujukan yang tertuang dalam kontrak politik memenuhi kebutuhan kolektif.

Tabel 2. Realisasi Kontrak Politik

Tuntutan	Realisasi	Penjelasan
Penetapan UMP DKI Jakarta lebih tinggi dari ketentuan pengupahan PP No.78/2015 dan didasarkan pada KHL serta menetapkan UMPS dan struktur skala upah sesuai UU 13/2003	Permintaan UMP berdasarkan dari perhitungan buruh tidak dapat dipenuhi sehingga UMP DKI tahun 2018, 2019 dan 2020 masih tetap didasarkan pada PP No.78/2015	Ketidak sanggupan Anies dalam hal ini karena KHL berbenturan dengan PP No.78/2015 sehingga Anies mengeluarkan kebijakan alternatif yaitu subsidi pada poin lain dalam kontrak politik; seperti subsidi transportasi, pendidikan anak pekerja, dan pangan
Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI	Penetapan UMPS berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.10/2020 kurang	Rata-rata buruh belum berminat dikarenakan syarat ketentuan yang berat yaitu

Jakarta	memuaskan namun dibandingkan sebelumnya adalah yang terbaik	setidaknya berpenghasilan menengah Rp.4 juta-Rp.7 juta sedangkan UMP DKI hingga saat ini belum menyentuh angka 4 juta
Subsidi tempat tinggal murah (Rusunami) di DKI Jakarta untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP Rp.0	Pembangunan Rusunami sudah selesai dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur	Diutamakan bagi buruh yang masih memiliki penghasilan di bawah garis UMP. Maka dengan bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk mendata.
Transportasi terjangkau buruh/pekerja termasuk di kawasan-kawasan industri publik untuk termasuk di	Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yakni PT Transjakarta untuk memberikan subsidi transportasi dengan angka anggaran 3,2 triliun tahun 2018 dan diterapkan di 13 koridor utama busway	Program transportasi gratis ini termasuk dalam satu program Kartu Pekerja yang dibagikan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta
Sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK serta kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta untuk memprioritaskan warga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja.	Solusi sejauh ini adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para pekerja/buruh dalam hal ekonomi kreatif	Dibentuknya Tim 7 yang disetujui oleh Anies diupayakan mampu untuk menampung dan menindak lanjuti misal pemasaran produk dari hasil pelatihan ekonomi kreatif
Pendidikan gratis hingga tingkat SMA, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga DKI Jakarta	Bagi buruh penerima Kartu Pekerja akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dimana anak pekerja SD mendapatkan subsidi Rp.250.000, SMP Rp.300.000, SMA Rp 420.000, SMK Rp 450.000 dan Perguruan Tinggi Rp 1.500.000 per-bulan	Dipersyaratkan hanya bagi buruh/pekerja yang ber-KTP DKI Jakarta
Tolak reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran	Izin bagi 13 pulau reklamasi dicabut dan memberikan IMB kepada 932 bangunan di kawasan pantai maju	FSPMI khususnya memiliki jaringan dengan kelompok nelayan yang terdampak reklamasi sehingga membantu menyuarakan tolak reklamasi
Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi ASN serta	Dana hibah untuk PAUD di seluruh Jakarta Rp 63 miliar Dana Ikatan Guru TK	Permasalahan tenaga honorer masih dalam kajian mendalam terutama terkait dengan masalah test ulang dan seleksi

tingkatan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan)	Indonesia (IGTK) Rp 23,5 miliar Kenaikan signifikan dana hibah PGRI DKI Jakarta dari Rp.1,8 tahun 2017 menjadi Rp.367 miliar untuk 2018.	administrasi bagi Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Honorer dengan pengabdian lebih lama.
Penerapan jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarga serta mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta memiliki program jaminan pensiun	Pemprov DKI memberikan program pelatihan kewirausahaan terpadu (PKT) untuk para pekerja korban PHK dan kerjasama gerai koperasi	Pembukaan Gerai Pekerja dan Pengembangan kewirausahaan terpadu aalah program Pemprov DKI Jakarta untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan buruh terutama
Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE	Bekerja sama dalam hal subsidi beberapa bahan pangan dengan koperasi-koperasi buruh yang ditunjuk	

Catatan: data dikelola oleh peneliti dari berbagai sumber.

Apabila menggunakan faktor programatik dari Savirani (2018) seperti; parsitipatif maka dari awal tuntutan hingga implementasi KBJ memiliki partisipasi yang tinggi baik saat perumusan kontrak politik, aksi besar dalam menagih kontrak politik hingga saat ini membentuk Tim 7 sebagai Tim khusus untuk memiliki akses terkait isu UMP, UMPS dan ekonomi kreatif. Negosiasi, negosiasi dari awal kontrak politik dilakukan melalui kajian mendalam antar tim hukum masing-masing kubu (KBJ-Anies dan Sandi) bahkan dalam kendala awal realisasi UMP KBJ mampu bernegosiasi dan memastikan bahwa alternatif dari ketidak sanggupan Anies-Sandi dalam menentukan UMP tidak berdasarkan PP No.78/2015 dapat terlaksana secara baik dan dalam pantauan. Kolektif, berbeda halnya dengan pola klientelitik dimana penerima manfaat diarahkan pada individu dan bersifat partikularistik, dalam kasus ini pertukaran manfaat diarahkan secara kolektif karena didistribusikan kepada buruh/pekerja secara keseluruhan dan merupakan hasil dari agregrasi kebutuhan kesejahteraan pekerja/buruh. Terakhir adalah waktu, dalam pola distribusi programatik ini KBJ dan Anies merealisasikannya setelah pemilu dan akan terus berlanjut hingga jangka panjang, selain itu program-program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan dianggarkan dalam dana anggaran pemerintah DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, terjadinya political engagement KBJ pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 di putaran kedua disebabkan oleh tiga hal utama yaitu; pertama, adanya peran policy broker yaitu Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam menghubungkan secara langsung tuntutan-tuntutan kelompok buruh di Jakarta yang dituliskan dalam program-program dalam kontrak politik kepada Anies R Baswedan-Sandiaga Uno. Peran Said Iqbal sangatlah sentral karena secara eksternal didasarkan atas keberhasilannya dalam membangun relasi dengan elit pimpinan partai pengusung calon kandidat beserta kandidat itu sendiri. Selain dari pada itu, Said Iqbal secara struktural memiliki

posisi strategis di level konfederasi dimana terdapat federasi-federasi besar yang terafiliasi di dalamnya seperti FSPMI. Kedua, kelompok buruh terutama federasi/serikat yang terafiliasi dengan KSPI mampu mengkonsolidasikan secara internal keputusan untuk mendukung Anies R Baswedan-Sandiaga Uno dan berkolaborasi dengan kelompok buruh lain di luar KSPI sehingga membentuk Kelompok Buruh Jakarta sebagai mesin politik dalam mendukung Anies-Sandi. Ketiga, program-program yang tertera dalam kontrak politik buruh memiliki kesamaan visi dan misi dengan program yang ditawarkan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno sehingga tim hukum dari kedua belah pihak sepakat membuat kesepakatan.

Terkait dengan hasil analisis realisasi politik programatik, terdapat beberapa hal yang menyebabkan distribusi politik programatik berjalan dengan efektif. Pertama, peran partisipatif yang tinggi kelompok buruh dalam konsolidasi internal sehingga secara kolektif mengorganisir anggotanya untuk terlibat dalam menindak lanjuti tiap-tiap program dalam kontrak politik. Dalam hal ini peran Winarso selaku Ketua DPW sekaligus Koordinator KBJ sangat efektif. Kedua, kolaborasi terkait realisasi politik programatik dilakukan secara sistematis dengan jalur birokratik yaitu melalui Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan energi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Adiyansyah. Secara langsung Adiyansyah bekerjasama dengan federasi-federasi dalam distribusi politik. Ketiga, negosiasi, dalam tahapan realisasi politik programatik kelompok buruh selalu memiliki posisi yang kuat terkait tawar menawar kepentingan seperti tawar menawar terkait Upah Minimum Provinsi yang tidak terpenuhi sehingga Anies dan Kelompok buruh sepakat untuk di tingkatkan ke Upah Minimum Sektoral. Keempat, kolektif dimana dalam proses distribusinya menyentuh tidak hanya pada buruh yang mendukung anies tetapi juga seluruh buruh yang ada di Jakarta serta kelompok lain di luar buruh, dengan adanya Tim 7 merupakan bukti adanya komunikasi langsung dari bawah ke atas guna memonitor realisasi politik programatik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan usul, saran dan senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, D., Panghegar, F., Samori, Heru P., & Raffiudin, R. (2018). *Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan*. Cakra Wikara Indonesia 2018.
- Ardipandanto, Aryojati.(2017)., "Tantangan Gubernur DKI Jakarta dalam Merealisasikan Janji Kampanye". *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol IX, No.21*
- Amin, Muryanto .(2011). *Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru*. *Jurnal POLITIEA Vol.3 No.1 Januari 2011 Universitas Sumatera Utara*.
- Beeson, Mark & Hadiz, Vedi .(2017).*Labor and the politics of structural adjustment in Australia and Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia, 28:3, 291-309, DOI:10.1080/00472339880000171*
- Caraway, Teri L .(2017). *Institutions and collective action in divided labor movements: Evidence from Indonesia*.(*Journal of Industrial Relations , SAGE Publications Ltd.*)
- Djani, Luky & Tornquist , Olle .(2017). *Dilemmas of Populist Transactionalism: What are the prospects now for popular politics in Indonesia?*(*PolGov Research Centre for Politics and Government Department of Politics & Government-FISIPOL UGM*).
- Ford, Michele .(2014), *Learning by doing: trade unions and electoral politics in Batam, Indonesia, 2004-2009*. *South East Asia Research, 22, 3, pp 341-357 doi: 10.5367/sear.2014.0219*.
- Habibi, Muhtar .(2013). *Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Flaksibel*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 16, Nomor 3, Maret 2013 (187-292)*.

- Iqbal, Said dan Cahyono, S Kahar, .(2018). Pemerintah Gagal Mensejahterakan Buruh? Sebuah Sudut Pandang dari Buruh yang Melawan: Catatan Kritis Perburuhan Tahun 2017. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018.
- Juliawan, Benny Hari .(2011). Street-level Politics: Labour Protest in Post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia* Vol. 41, No. 3, August 2011, pp. 349-370.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Evaluasi Pilkada .(2017). Pilkada Transisi Jurnal#10. Evaluasi Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional.
- Kitschelt, Herbert .(2000)., Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities, in: *Comparative Political Studies*.
- Lane, Max .(2018). The Rise and Decline of Labour Militancy in Batam. *Trends in Southeast Asia*. ISEAS Yusof Ishak Institute. 2018.
- Lane, Max. .(2018). Trade Union's Initiative To Create Alternative Political Force in Indonesia. *Perspective Research at ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*. ISSUE: 2018 No.34
- Lane, Max. (2018). The Politics of Wages and Indonesia's Trade Unions. *Perspective. Research at ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*. ISSUE:2018 No.4 page. 3-4).
- Arsip Nasional Republik Indonesia.(2019). Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) 2019 Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
- Perkumpulan Sosdem Indonesia. (2011). *Jurnal Sosial Demokrasi* Vol. 10>4>(Januari-Maret). Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi.
- Setiawan, Ade. (2011). Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik.
- Savirani, Amalinda, and Edward Aspinall .(2017), Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta, in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36,3, 3-34.
- Saleh, Mohammad Didit. (2017). Gerakan Buruh dan Eskperimentasi Politik: Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Bekasi. *Institute for Strategic Initiatives*.
- Stokes, Susan C., Dunning, Thad., Nazareno, Marcelo., & Brusco, Valeria.(2013).). *Bokers, Voters, and Clientelism The Puzzle of Distributive Politics*. Cambrige University Press.
- Triyono, (2016). Analisis Prospek Politik Buruh Pasca Pemilu 2014. *Jurnal Review Politik* Volume 06, No 01 Juni 2016.
- Tomsa, Dirk and Ufen, .(2013). *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*. Routledge.
- Zuhdan, Muhammad. (2017). *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*.